

**EVEKTIVITAS PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DEMOKRASI GENERASI MUDA**

**Nadilati Fuddailah<sup>1</sup>, Puja Lestari<sup>2</sup>, Maulida Winda<sup>3</sup>, Ayu Suraya<sup>4</sup>, Nofriadi<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Email Korespondensi: nadilatifuddailah@gmail.com

Email: puja.lestari100122@gmail.com; maulidawnd@gmail.com; ayu632277@gmail.com; nofriadi\_fisip@usk.ac.id

**ABSTRACT**

Banda Aceh as a region with special autonomy has the authority to develop a democracy rooted in local values; however, the political awareness of youth remains relatively low. This study aims to analyze the implementation of political education programs by the National Unity and Politics Agency using the policy implementation theory of George C. Edward III. The research employs a descriptive qualitative method through interviews, observation, and documentation. The results show that the program has been implemented fairly well and has increased political participation, but it is not yet optimal. Communication remains one-way, resources are limited, and implementation is not sustainable, although the disposition of implementers and bureaucratic structure are adequate. Supporting factors include a strong legal basis and inter-institutional collaboration, while obstacles include low youth interest, program limitations, and the influence of social media. Overall, the program contributes to improving democratic awareness but requires innovation and more systematic evaluation to enhance its effectiveness and sustainability.

**Keywords:** Political education, Democratic awareness, Young generation.

**ABSTRAK**

Banda Aceh sebagai daerah dengan status kekhususan memiliki kewenangan dalam membangun budaya demokrasi, namun kesadaran politik generasi muda masih rendah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggunakan teori George C. Edward III dengan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan program berjalan cukup baik dan meningkatkan partisipasi, tetapi belum optimal karena komunikasi masih satu arah, sumber daya terbatas, dan pelaksanaan belum berkelanjutan, meskipun disposisi pelaksana dan struktur birokrasi sudah baik. Faktor pendukung meliputi dasar hukum dan kerja sama lintas lembaga, sedangkan hambatan berasal dari rendahnya minat generasi muda, keterbatasan program, dan pengaruh media sosial. Program berkontribusi pada peningkatan kesadaran demokrasi, namun memerlukan inovasi dan evaluasi agar lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Pendidikan Politik, Kesadaran Demokrasi, Generasi Muda

**PENDAHULUAN**

Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, dan aktivitas sosial masyarakat yang memiliki dinamika politik cukup berkembang. Status kekhususan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan kehidupan politik lokal, termasuk dalam upaya membangun budaya demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pertumbuhan jumlah penduduk yang didominasi oleh generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, menjadi potensi strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Kondisi tersebut juga diiringi dengan tantangan berupa masih rendahnya pemahaman politik

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

76

Indexed



serta partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi di tingkat lokal, yang menunjukkan perlunya intervensi melalui pendidikan politik yang lebih efektif (Zainal, 2022).

Generasi muda memiliki posisi penting sebagai agen perubahan dalam sistem demokrasi. Peran tersebut menuntut adanya pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi dinamika politik. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian generasi muda cenderung apatis terhadap isu politik, kurang tertarik mengikuti proses pemilihan umum, serta memiliki tingkat literasi politik yang masih rendah. Arus informasi digital yang semakin cepat turut memengaruhi pola pikir generasi muda, terutama dengan maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks di media sosial. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik jika tidak diimbangi dengan pendidikan politik yang memadai (Rafli & Tetep, 2026).

Upaya peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, salah satunya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Lembaga ini memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan program pendidikan politik yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi, meningkatkan partisipasi politik, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Program pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai proses pembentukan sikap dan perilaku politik yang demokratis. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh metode, pendekatan, serta relevansi materi yang disampaikan kepada generasi muda (Ningsih, 2025).

Pelaksanaan program pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar, penyuluhan, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menjangkau generasi muda secara luas dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap demokrasi. Hasil implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan politik masih belum optimal. Sebagian peserta hanya mengikuti kegiatan secara formalitas tanpa adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Kesenjangan antara materi yang disampaikan dengan tingkat pemahaman peserta menjadi indikator bahwa efektivitas program masih perlu ditingkatkan melalui inovasi metode pembelajaran yang lebih interaktif dan kontekstual (Hasanah, 2023).

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik generasi muda dalam beberapa pemilihan umum mengalami fluktuasi. Fenomena ini mencerminkan bahwa kesadaran demokrasi belum terbentuk secara konsisten di kalangan generasi muda. Rendahnya partisipasi tidak hanya disebabkan oleh kurangnya informasi, tetapi juga oleh rendahnya kepercayaan terhadap proses politik serta minimnya pemahaman mengenai pentingnya peran individu dalam sistem demokrasi. Kondisi ini menuntut adanya strategi pendidikan politik yang lebih adaptif, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media edukasi yang sesuai dengan karakteristik generasi muda (A. K. Ramadhani et al., 2025).

Kesadaran demokrasi yang rendah memberikan dampak yang cukup luas terhadap kualitas kehidupan politik masyarakat. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi dapat menimbulkan sikap apatis, pragmatis, serta kecenderungan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik (Huda et al., 2024). Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas demokrasi serta melemahkan legitimasi pemerintahan. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang didukung oleh pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip dasar seperti keterbukaan, akuntabilitas, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat (A. Ramadhani, 2025).

Pendidikan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi dan kesadaran demokrasi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa akademisi menunjukkan bahwa metode pendidikan politik yang partisipatif dan berbasis pengalaman lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman generasi muda dibandingkan dengan metode konvensional yang bersifat satu arah. Temuan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan pendidikan politik yang lebih inovatif dan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga mampu menarik minat generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik (Mulia, 2024).

Kesenjangan antara harapan dan realitas dalam pelaksanaan program pendidikan politik menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini. Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh perlu dievaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitasnya dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda. Evaluasi ini tidak hanya mencakup hasil yang dicapai, tetapi juga proses pelaksanaan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam meningkatkan kualitas program pendidikan politik di masa yang akan datang.

## METODE

Sugiyono, (2017) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru, memecahkan masalah, serta memahami fenomena secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai efektivitas program pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait perilaku, persepsi, serta tingkat pemahaman generasi muda terhadap demokrasi. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkap bagaimana proses pelaksanaan program, bentuk kegiatan yang dilakukan, serta sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program pendidikan politik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik serta interaksi antara penyelenggara dan peserta. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan yang terdiri dari pihak penyelenggara program, yaitu pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, serta generasi muda sebagai peserta kegiatan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, foto, serta arsip yang berkaitan dengan program pendidikan politik. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan dan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan, sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas program pendidikan politik dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda.

Melalui metode penelitian kualitatif deskriptif ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas program pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas program pendidikan politik di masa yang akan datang

## PEMBAHASAN

### Implementasi Program Pendidikan Politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Program pendidikan politik di Kota Banda Aceh merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda. Program ini dilatarbelakangi oleh dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang menegaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban untuk

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

78

Indexed



melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan partai politik sebagai aktor penting dalam sistem demokrasi. Selain itu, keberadaan Instruksi Presiden tahun 1982 turut memperkuat urgensi pendidikan politik dalam membentuk kesadaran berbangsa dan bernegara sejak dini (Ningsih et al., 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kesbangpol Kota Banda Aceh, pendidikan politik dipahami sebagai proses pembelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman tersebut mencakup kesadaran untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, khususnya dalam kegiatan pemilihan umum. Pendidikan politik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga diarahkan pada pembentukan sikap kritis dan tanggung jawab dalam menentukan pilihan politik. Generasi muda sebagai pemilih pemula menjadi sasaran utama karena mereka memiliki peran penting dalam menentukan arah kepemimpinan di masa depan.

Pelaksanaan program pendidikan politik melibatkan berbagai pihak, seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta partai politik. Partai politik memiliki peran yang cukup signifikan karena menerima bantuan hibah dari pemerintah yang salah satu tujuannya adalah untuk melaksanakan pendidikan politik. Dalam pelaksanaannya, partai politik memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara berpartisipasi dalam demokrasi yang benar. Materi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan prosedur pemilihan umum, tetapi juga menekankan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki kualitas, integritas, serta rekam jejak yang baik. Proses implementasi program dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, khususnya tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Sasaran ini dipilih karena siswa SMA merupakan kelompok yang akan segera memasuki usia pemilih. Kegiatan sosialisasi biasanya dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan, di mana pihak Kesbangpol meminta izin kepada sekolah untuk melaksanakan kegiatan edukasi politik. Selain itu, kegiatan juga dilakukan dengan mengundang masyarakat atau kelompok pemuda dalam forum tertentu yang difasilitasi oleh partai politik maupun instansi terkait. Pendekatan ini bertujuan agar penyampaian materi dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.

Materi yang disampaikan dalam program pendidikan politik menekankan pentingnya kesadaran dalam menggunakan hak pilih secara bijak. Generasi muda diajarkan untuk tidak memilih secara sembarangan, melainkan berdasarkan pertimbangan rasional terhadap kualitas calon pemimpin. Pemahaman mengenai pentingnya melihat rekam jejak, kapasitas, serta dedikasi calon pemimpin menjadi bagian utama dalam materi yang diberikan. Penekanan ini dilakukan karena pilihan politik yang diambil akan berdampak dalam jangka waktu yang panjang, terutama dalam menentukan arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Hasil implementasi program pendidikan politik menunjukkan adanya dampak positif terhadap peningkatan partisipasi generasi muda dalam kegiatan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang relatif tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, jumlah pemilih di Kota Banda Aceh mencapai sekitar 181.000 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring bertambahnya jumlah pemilih pemula. Tingginya angka partisipasi ini menjadi indikator bahwa program pendidikan politik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesadaran demokrasi, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pemahaman politik secara mendalam. Pengukuran efektivitas program pendidikan politik masih terbatas pada indikator kuantitatif, yaitu tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Pendekatan ini belum mampu menggambarkan secara komprehensif tingkat pemahaman dan kesadaran politik generasi muda. Pihak Kesbangpol menyatakan bahwa data yang lebih rinci mengenai pemilih pemula dapat diperoleh dari lembaga lain seperti KIP dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kondisi ini menunjukkan bahwa evaluasi program masih memerlukan pengembangan metode yang lebih sistematis agar dapat mengukur keberhasilan program secara lebih akurat.

Implementasi program pendidikan politik, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang terdiri dari empat indikator utama, yaitu komunikasi,

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

79

Indexed



sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh mampu berjalan secara efektif dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda di Banda Aceh.

## 1. Komunikasi

Pelaksanaan komunikasi pada program pendidikan politik dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi yang menasar generasi muda sebagai kelompok utama. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyampaian informasi dilakukan secara langsung melalui kegiatan di sekolah-sekolah, khususnya tingkat SMA yang menjadi sasaran pemilih pemula. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan melalui forum masyarakat serta kegiatan yang difasilitasi oleh partai politik. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum, serta cara memilih pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas. Proses komunikasi ini bertujuan untuk membangun kesadaran awal generasi muda agar tidak menggunakan hak pilih secara sembarangan.

Efektivitas komunikasi tersebut dapat dikatakan cukup baik karena telah mampu menjangkau sebagian generasi muda, terutama yang berada di lingkungan pendidikan formal. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya merata dan belum mampu dipahami secara mendalam oleh seluruh peserta. Sebagian generasi muda masih memahami pendidikan politik secara umum tanpa mampu mengaitkannya dengan praktik demokrasi yang sebenarnya. Pola komunikasi yang masih bersifat satu arah menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya pemahaman tersebut. Kebutuhan akan pendekatan komunikasi yang lebih interaktif dan berkelanjutan menjadi penting agar pesan yang disampaikan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami secara kritis oleh generasi muda.

## 2. Sumber Daya

Pelaksanaan program pendidikan politik didukung oleh berbagai sumber daya yang melibatkan beberapa lembaga, antara lain Kesbangpol, Komisi Independen Pemilihan (KIP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta partai politik. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan adanya dukungan kelembagaan yang cukup kuat dalam pelaksanaan program. Partai politik memiliki peran penting karena memperoleh bantuan hibah dari pemerintah yang digunakan untuk kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat. Dukungan tersebut memungkinkan terselenggaranya berbagai kegiatan sosialisasi yang ditujukan kepada generasi muda sebagai pemilih pemula.

Keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program, terutama dari sisi pendanaan dan intensitas kegiatan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak memiliki jadwal tetap setiap tahun dan cenderung dilakukan pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang pemilihan umum. Kondisi ini menyebabkan jangkauan program menjadi terbatas dan tidak berlangsung secara berkelanjutan. Jumlah kegiatan yang terbatas juga berdampak pada belum meratanya penyampaian pendidikan politik kepada seluruh generasi muda. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun sumber daya tersedia, pemanfaatannya masih perlu ditingkatkan agar program dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau sasaran secara lebih luas.

## 3. Disposisi

Sikap pelaksana program menunjukkan adanya komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kegiatan pendidikan politik. Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh aktif melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, KIP, dan Bawaslu. Upaya sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah serta kerja sama dengan berbagai pihak menunjukkan adanya keseriusan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda. Komitmen ini juga terlihat dari keberlanjutan kegiatan sosialisasi yang tetap dilakukan meskipun menghadapi keterbatasan tertentu.

Respons generasi muda terhadap program pendidikan politik cenderung positif, terutama dalam hal partisipasi pada pemilihan umum. Tingkat kehadiran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi salah satu indikator bahwa generasi muda mulai memahami pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Meskipun demikian, tingkat kesadaran tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor individu masing-masing. Sebagian generasi muda masih menunjukkan sikap apatis dan kurang memiliki ketertarikan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

80

Indexed



terhadap isu politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada komitmen pelaksana, tetapi juga pada kesiapan individu dalam menerima dan memahami nilai-nilai demokrasi.

#### 4. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan program pendidikan politik melibatkan struktur birokrasi yang terdiri dari berbagai instansi seperti Kesbangpol, Dinas Pendidikan, KIP, Bawaslu, serta partai politik. Setiap instansi memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan program, baik dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, maupun pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Proses koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung antar instansi, seperti permohonan izin pelaksanaan kegiatan di sekolah serta kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan politik kepada generasi muda. Struktur yang jelas mempermudah pelaksanaan program karena setiap pihak memahami perannya masing-masing.

Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi telah berjalan dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Program pendidikan politik masih bergantung pada momentum tertentu dan belum memiliki perencanaan yang terjadwal secara sistematis. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum terintegrasi secara berkelanjutan dan belum mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Peningkatan koordinasi serta perencanaan yang lebih terstruktur menjadi hal yang penting agar program dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih maksimal terhadap peningkatan kesadaran demokrasi generasi muda.

#### Faktor Pendukung dan Penghambat Program Pendidikan Politik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh di Banda Aceh dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam mencapai tujuan peningkatan kesadaran demokrasi generasi muda. Faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program ini salah satunya adalah adanya dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur kewajiban partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Keberadaan regulasi ini memberikan legitimasi sekaligus arah yang jelas bagi pelaksanaan program pendidikan politik, sehingga kegiatan yang dilakukan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, keterlibatan berbagai lembaga seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dinas Pendidikan turut memperkuat pelaksanaan program melalui kerja sama lintas sektor yang saling mendukung.

Jumlah generasi muda yang cukup besar di Kota Banda Aceh juga menjadi faktor pendukung yang signifikan karena merupakan potensi utama sebagai pemilih pemula dalam sistem demokrasi. Keberadaan kelompok ini memberikan peluang besar bagi keberhasilan program pendidikan politik apabila dapat dijangkau secara optimal. Dukungan dari lembaga pendidikan, khususnya sekolah, juga memberikan akses yang luas dalam pelaksanaan sosialisasi karena sekolah menjadi tempat yang efektif untuk menjangkau generasi muda secara langsung. Di samping itu, adanya bantuan dana hibah kepada partai politik turut mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan politik, terutama dalam bentuk sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan program pendidikan politik juga menghadapi berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu kendala utama adalah tingkat kesadaran politik generasi muda yang masih sangat bergantung pada individu masing-masing. Tidak semua generasi muda memiliki minat dan kepedulian yang sama terhadap isu politik, sehingga sebagian di antaranya masih bersikap apatis terhadap kegiatan demokrasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya meningkatkan kesadaran politik secara menyeluruh.

Pelaksanaan program yang tidak memiliki jadwal tetap setiap tahun juga menjadi salah satu faktor penghambat. Kegiatan pendidikan politik cenderung bersifat situasional dan sering kali dilakukan menjelang momentum politik tertentu, sehingga kurang memberikan efek jangka panjang terhadap pembentukan kesadaran demokrasi. Selain itu, keterbatasan dalam pengukuran efektivitas program secara sistematis menyebabkan sulitnya mengetahui sejauh mana keberhasilan program dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda. Pengaruh lingkungan serta media sosial juga menjadi tantangan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

81

Indexed



tersendiri dalam pelaksanaan program pendidikan politik. Informasi yang tidak selalu akurat dan cenderung bias dapat memengaruhi pola pikir generasi muda dalam memahami politik. Situasi ini dapat menghambat upaya pendidikan politik yang telah dilakukan, terutama jika tidak diimbangi dengan kemampuan literasi informasi yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah berjalan dengan cukup baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan partisipasi generasi muda dalam demokrasi. Tingkat efektivitas program masih memerlukan peningkatan melalui penguatan metode pelaksanaan, pengembangan sistem evaluasi yang lebih terstruktur, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik generasi muda agar kesadaran demokrasi dapat berkembang secara lebih optimal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas program pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda di Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang ditujukan kepada generasi muda, khususnya pemilih pemula di tingkat sekolah menengah. Program ini memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi, terutama dalam pemilihan umum. Ditinjau dari aspek komunikasi, pelaksanaan program pendidikan politik telah dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah serta kerja sama dengan instansi terkait seperti KIP dan Bawaslu. Penyampaian informasi mengenai pentingnya partisipasi politik sudah dilakukan secara langsung kepada generasi muda. Meskipun demikian, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan generasi muda secara merata, sehingga masih terdapat sebagian yang belum memahami secara mendalam mengenai tujuan dan pentingnya pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi.

Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program pendidikan politik telah didukung oleh berbagai pihak seperti Kesbangpol, partai politik, serta lembaga penyelenggara pemilu. Dukungan tersebut mencakup pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta pemberian materi pendidikan politik kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan program, terutama pada aspek pendanaan dan intensitas kegiatan yang tidak memiliki jadwal tetap setiap tahunnya. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh generasi muda di Kota Banda Aceh. Sementara itu, dari aspek disposisi, aparaturnya menunjukkan komitmen yang cukup baik dalam menjalankan program pendidikan politik. Hal ini terlihat dari upaya aktif dalam melakukan sosialisasi serta kerja sama dengan lembaga pendidikan. Generasi muda juga menunjukkan respons yang cukup positif, terutama dalam hal partisipasi pada pemilihan umum. Namun demikian, tingkat kesadaran demokrasi masih dipengaruhi oleh faktor individu masing-masing, sehingga tidak seluruh generasi muda memiliki tingkat pemahaman dan kepedulian yang sama terhadap isu politik.

Dari aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program pendidikan politik telah melibatkan koordinasi antara berbagai instansi seperti Kesbangpol, Dinas Pendidikan, KIP, dan Bawaslu. Koordinasi ini mempermudah pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta mendukung kelancaran program di lapangan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan koordinasi dan penguatan sistem pelaksanaan agar program dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Secara keseluruhan, program pendidikan politik oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran demokrasi generasi muda, yang ditunjukkan melalui partisipasi dalam pemilihan umum. Tingkat efektivitas program masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pemerataan penyampaian informasi, penguatan sumber daya, serta pengembangan metode pelaksanaan agar mampu memberikan dampak yang lebih optimal.

## REFERENSI

- Hasanah, N. (2023). *Kesbangpol Banda Aceh intensifkan pendidikan politik untuk Pemilu 2024*. ANTARA.
- Huda, K., Doloksaribu, T. I., & Siregar, S. H. (2024). Perilaku Politik Mahasiswa dan Generasi Muda. *Future Academia The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(4), 761–782.
- Mulia, A. A. M. (2024). Pendidikan Politik dan Manfaat Peranannya Di Masyarakat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 3(2), 515–532.
- Ningsih, T. F. (2025). Peran Partai Aceh Dalam Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kota Lhokseumawe (Studi Penelitian di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 1–20.
- Ningsih, T. F., Sari, E., & Iskandar, H. (2025). Peran Partai Aceh Dalam pendidikan Politik Bagi Masyarakat Lhokseumawe (Studi Penelitian di Kantor Partai Aceh Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 759.
- Rafli, & Tetep. (2026). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Literasi Politik Mahasiswa di Era Media Digital. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1), 185–195.
- Ramadhani, A. (2025). *Apatisme Politik generasi Muda dan Krisis Pendidikan Politik di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Ramadhani, A. K., Saputra, F. A., & Alfarizy, M. S. (2025). Menurunnya Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2024 Kabupaten Tulungagung Di Wilayah Desa Tiudan. *Dinamically*, 1(1), 64–82.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
- Zainal, S. (2022). Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *Jurnal Sosiologi USK : Media Pemikiran & Aplikasi*, 16(1), 87–104.